

Pecalang: Dinamika Kontestasi Kekuasaan di Bali

Gede Indra Pramana¹

Abstract

Discussions on Bali today are dominated by the hustle and bustle of tourism. Bali is often depicted as exclusive territory free from politics. Therefore, readings about Bali are commonly analysed in the context of tourism development. This article tries to show that Bali is not merely an exotic paradise. By reviewing pecalang, the guardian of traditional customs in Bali, it will be shown that power struggles take place in the meaning of pecalang. The genealogy of power in Bali also shows that power is truly embedded in the everyday life of the Balinese.

Keywords

Pecalang, Power relations, Genealogy, Empty Signifier

Pendahuluan

Ketika mendengar kata Bali seketika muncul dipikiran kita objek pariwisata dengan berbagai tawaran, masyarakat yang ramah, dan budaya unik yang menjadi ciri khasnya. Gagasan ini muncul dalam benak kita, seolah-olah hal ini merupakan suatu yang niscaya dan kita terima secara *taken for granted*. Anggapan umum yang dominan adalah tentang Bali yang netral, bebas dari pengaruh global dan kuat bertahan dengan tradisinya. Pandangan ini mendudukan Bali sebagai semacam suaka yang harus dijaga, dan dijauhkan dari perubahan-perubahan yang disebabkan berbagai krisis, baik tingkatan nasional maupun global. Di sinilah pra-anggapan tentang Bali ini menjadi semacam disiplin ilmu, yang ditaati oleh segenap manusia Bali dan menjadi tolak ukur perkembangan Bali yang normal.

Manusia Bali bergerak dan memproduksi dalam kerangka-kerangka aturan yang ditetapkan, dan karenanya menjadi wajar jika produk-produk yang dihasilkan dianggap sesuatu yang khas dan hanya berlangsung di Bali. Semuanya dilakukan demi menunjang sektor pariwisata, sektor dominan yang menjadi sumber perekonomian utama di Bali. Padahal perkembangan Bali saat ini jauh dari gambaran ideal. Pada perkembangannya, Bali mengalami perubahan yang merentang sejak jaman kolonial—ketika penundukan atas negara-negara klasik berlangsung, kemudian juga periode revolusi, transisi berdarah yang menyertai kudeta Untung dan kontra-kudera Soeharto, periode Orde Baru, hingga tumbangannya pada 1998. Semuanya turut serta mewarnai berbagai gejolak yang berlangsung di Bali, sebagai salah satu wilayah strategis dari Republik ini.

Dalam merespon berbagai perubahan yang berlangsung, tradisi menjadi pilihan dalam mendasarkan jawaban atas kondisi Bali hari ini. Berbagai seminar diselenggarakan, berbagai penelitian dilakukan, dan berbagai kebijakan diterapkan.² Semuanya untuk

¹ Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, aktif di Lembaga Studi Urban Surabaya. Penulis dapat dihubungi di indra.prama@gmail.com

² Henk Schult Nordholt (2005) mencatat hal ini, dan memberikan contoh seminar Ajeg Bali yang diselenggarakan oleh Kelompok Media Bali Post.

mengatasi kondisi Bali yang semakin sesak sejalan dengan pembangunan yang dilakukan. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah kemunculan satuan pengamanan adat yang bernama Pecalang. Ini terlihat jelas bagaimana pecalang menjadi bagian dari *image* yang luar biasa dari PDI Perjuangan, atau citra rasa aman penyelenggara kegiatan-kegiatan industri hiburan di Bali (Suryawan, 2005; 23).

Pecalang menjadi menarik dikaji karena kehadirannya yang serta merta seolah-olah menjadikannya sesuatu yang normal. Padahal, dibalik kisah *Pecalang*, terdapat kisah panjang tentang pergulatan kuasa di Bali. Tulisan ini berusaha menelisik kasus *Pecalang*, dan menunjukkan bagaimana pecalang menjadi lokus kontestasi dari pertarungan kepentingan masyarakat adat disatu sisi, dan negara dan modal disisi yang lain. *Pecalang* sebagai representasi adat sekaligus penjaga keamanan di lingkungan desa dengan perannya yang dominan tentu memiliki peran strategis kedepannya, karenanya menjadi penting untuk lebih jauh mengkaji tentang kehadirannya hari ini.

Genealogi Kekuasaan di Bali: Dualisme Pemerintahan Desa Adat *versus* Desa Dinas

Sejarah Bali menunjukkan bahwa Bali yang kita kenal saat ini merupakan hasil dari pembentukan dalam kurun periode yang merentang hingga awal abad ke 11. Berbagai kajian telah dilakukan guna meneliti perkembangan Bali. Clifford Geertz (2000) misalnya, melakukan penelitian tentang Negara di Bali pada periode transisi dari pemerintahan kolonial ke Republik. Hasil penelitiannya memperlihatkan bagaimana Bali adalah suatu negara teater, di mana penyelenggaraan pemerintahan terkait erat dengan upacara-upacara yang menjadi fokus dari penyelenggaranya. Negara hadir untuk upacara, bukan sebaliknya. Hal ini membawa implikasi yang menarik dan menandai suatu usaha untuk tidak melihat Bali sebagai suatu objek yang eksotis dan eksklusif dari politik, suatu gambaran yang selama ini menjadi wacana dominan tentang Bali.

Kajian Henk Schult Nordolt (2009) memberi arahan lebih jauh dari studi Geertz, yang menurutnya terlalu memusatkan perhatian raja-raja sebagai ikon dari negara. Nordholt menunjukkan bahwa para raja dan bangsawan ini juga merupakan aktor yang aktif dalam memusatkan dan mengakumulasi kekuasaannya. Konsep negara kontestasi yang ditawarkan menunjukkan betapa dinamisnya politik pada masa-masa itu.

Akan tetapi, pada periode kolonial, perkembangan politik di Bali memasuki suatu periode dramatis, dimana kekuasaan dari raja-raja dan bangsawan ini ditundukan dalam suatu birokrasi kolonial yang mengatur, dan mengubah dinamika politik di Bali.³ Setelah seluruh pemerintah negara di Bali ditundukan, Belanda menerapkan apa yang dikenal sebagai kebijakan *Baliseering*. Ancaman nasionalisme yang berkembang di Jawa, dan pemberontakan kaum komunis yang berkobar pada dekade-dekade awal abad ke 19, membuat pemerintah kolonial menjadikan Bali sebagai benteng dalam menahan arus perkembangan pergerakan di koloni Hindia Belanda ini.

³ Bandingkan dengan Geoffrey Robinson (2006), dan Agus Purbathin Hadi, (tanpa tahun) *Eksistensi Desa Adat dan Kelembagaan Lokal: Kasus Bali*

Dimulailah suatu episode rekonstruksi ulang dari kejayaan peradaban Bali, dan usaha-usaha penegakan khasanah budaya Bali yang dengan serta merta dilakukan. Raja-raja yang dulunya dibuang, didatangkan kembali, atau jika sudah meninggal dalam masa pembuangannya, keturunannya yang dipanggil. Wilayah-wilayah yang dulunya dikuasai para raja dan bangsawan ini dikembalikan dengan syarat ketertundukan dan monoloyalitas dibawah pemerintah kolonial Hindia Belanda. Bali mulai dipromosikan sebagai wilayah eksotis, dengan penduduknya yang ramah, guna menjadikan Bali sebagai objek pariwisata.

Dalam derajat tertentu, sistem yang diterapkan pemerintah kolonial mengubah struktur politik yang telah lebih dahulu ada. Dengan menerapkan desa dinas, yang paralel posisinya dengan desa adat, pemerintah kolonial berusaha menghimpun tenaga dalam kerangka negara kolonial demi memberlakukan kerja rodi. Di satu sisi, desa adat tunduk terhadap raja-rajanya, disisi lain, menjadi kewajiban bagi para budak yang malang ini untuk menyumbangkan tenaganya bagi proyek-proyek pemerintah kolonial.

Sejalan dengan perkembangannya, usaha ini ternyata tak jua mampu meredam arus revolusi yang berkembang pasca perang dunia kedua. Pergolakan dari arus revolusi nasional dan revolusi sosial membangkitkan semangat perjuangan rakyat Bali, mendorong partisipasinya dalam pendirian Republik ini. Pada 1948, Presiden Negara Indonesia Timur Tjokorde Gde Sukawati menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno. Secara formal yuridis, wilayah Nusa Kecil dan Indonesia Timur, kecuali Papua yang bergabung belakangan, bersatu dengan Republik Indonesia.

Periode kepemimpinan Soekarno berakhir dengan suatu tragedi. Diawali saat subuh 1 Oktober 1965, intrik politik yang berlangsung di Jakarta, dengan PKI, Soekarno sendiri, dan Angkatan Darat sebagai lakon utama, melahirkan suatu periode paling berdarah dalam sejarah Republik. Kematian 7 orang petinggi militer angkatan darat, ditutup dengan pembantaian massal dengan menyudutkan posisi PKI, yang mana anggota dan simpatisannya mati dibunuh, atau dibuang sebagai tahanan politik tanpa pengadilan ke pulau Buru.

Tirai Orde Baru, sebutan yang digunakan Soeharto dalam periode pemerintahannya, dibuka dengan darah korban-korban pembantaianya. Bali pun tak lepas dari operasi komando pemulihan keamanan dan ketertiban ini. Ratusan ribu rakyat Bali juga dibersihkan dari bahaya laten komunis. Sejak itu pula kuku kuasa Soeharto mencengkram Bali. Masa pembangunan Soeharto ditandai dengan semangat pembangunan guna meningkatkan perekonomian dalam negeri. Penanaman modal asing diberlakukan, dan arus kapital secara massid memasuki wilayah-wilayah Indonesia. Di Bali, suatu usaha serius pengembangan pariwisata kembali dilakukan melalui serangkaian promosi dan kebijakan oleh pemerintah Orde Baru. Melalui tangan-tangan kuasanya, Bali kembali dirangkai sebagai objek pariwisata yang eksotis. Desa dinas menjadi ujung tombak pembangunan, dan melakukan fungsi birokrasi dari rezim. Bali menggeliat kembali melalui budaya pariwisata yang dikembangkan Orde Baru.

Memasuki dekade 90-an, ketika pembangunan Soeharto telah memasuki dekade yang ketiga, krisis menerpa Asia Tenggara, dan secara drastis menghantarkan Soeharto ke penghujung tampuk kekuasaannya. Demonstrasi-demonstrasi yang muncul pada periode

akhir pemerintahan Orde Baru, menjadi buah dari tangan besi Soeharto dan kroni-kroni, menandai usaha perlawanan yang telah dirintis sejak periode-periode sebelumnya. Lars dan senjata tak mampu lagi membungkam perlawanan yang dilakukan terhadap rezim.

Ketika akhirnya Soeharto tumbang, eksperimentasi demokrasi diterapkan sebagai jawaban atas tantangan transisi politik yang berlangsung. Secara bertahap Pemilu langsung diterapkan, diikuti dengan desentralisasi yang mengubah dinamika politik dalam negeri. Di Bali, PDI Perjuangan yang dikenal sebagai partai oposisi pimpinan Megawati Soekarnoputri, putri Bung Karno yang beribu orang Bali, meraih kemenangan mutlak yang hingga pemilu-pemilu berikutnya. Kongres PDI Perjuangan yang dilaksanakan di Bali, menjadi momen tak terlupakan, dimana *pecalang* turut hadir dan berperan dalam menjaga jalannya kongres. Peran *pecalang* mulai dikenal luas setelah kesuksesannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban kongres. Sosok pria kekar berkacamata hitam, yang menggunakan *kamen*, kain khas Bali, dengan saput *poleng*-nya, serta keris dipinggang dan *handy-talkie* di tangan, muncul ditengah momen ini.

Pecalang dalam Pusaran Kuasa

Setelah diatur dalam Peraturan Daerah no. 3 tahun 2001 tentang Desa Pekraman, disebutkan *Pacalang* atau *Langlang* atau dengan sebutan lainnya adalah satgas (satuan tugas) keamanan tradisional masyarakat Bali yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, baik ditingkat banjar *pakraman* dan atau di wilayah desa. Di beberapa daerah kemudian *pecalang* mulai merambah masuk dan menerima *order* dalam menjaga keamanan bagi aset-aset vital yang mendukung industri pariwisata di Bali.

Degung Santikarma (2003) mencatat bahwa beberapa orang di desanya yang terletak sebelah timur Denpasar, ketika ditanya bisa menjelaskan dari mana istilah *pecalang* berasal atau dengan yakin mengaitkan sejarah kelompok-kelompok ini. Beberapa mengatakan bahwa pendahulu *pecalang* adalah 'gugus tugas' dari penjaga keamanan untuk konferensi 1998 partai Megawati (PDIP) di Bali. Lainnya mengatakan bahwa *pecalang* muncul pada awalnya akhir tahun 1970-an ketika Pesta Kesenian Bali, even besar budaya tahunan, mulai menggunakan penjaga keamanan berpakaian adat untuk mengarahkan lalu lintas dan menjaga parkir. Yang lain percaya bahwa *pecalang* adalah inkarnasi modern dari penjaga istana. Dan mereka yang masih bisa mengingat kekerasan tahun 1965 bahwa *pecalang* adalah kebangkitan geng bertanggung jawab untuk melakukan eksekusi terhadap yang dituduh komunis.

Apapun latar belakang yang memberikan asal usul bagi *pecalang*, satu hal yang pasti, kehadiran *pecalang* menegaskan eksistensi desa pekraman. Hal ini membawa konsekuensi yang tidak dapat dikatakan kecil. Masyarakat adat merangsek masuk dalam wilayah-wilayah yang dulunya merupakan wilayah eksklusif Negara. Sulit misalnya membayangkan pada masa Orde Baru Soeharto terdapat kelompok yang berfungsi menjaga keamanan yang terpisah dari koordinasi Negara.

Hasil pengamatan terbatas yang dilakukan penulis mencatat bahwa di Kota Denpasar saja terdapat 1.450 *Pecalang* yang dibawah 36 desa pekraman. Bandingkan dengan jumlah riil total anggota Polisi Kota Besar Denpasar sebanyak 1.801. Dengan potensi yang

dimilikinya, pecalang secara perlahan masuk ke ranah-ranah yang sebelumnya diatur negara. Fungsi keamanan yang dulu dimonopoli kepolisian, mulai bergeser kearah koordinasi antara polisi dan pecalang. Disatu sisi ini merupakan menunjukkan perkembangan yang positif terkait peningkatan keamanan di Bali. Akan tetapi disisi lain, hal ini membuat ladang keamanan menjadi wilayah yang rawan, perebutan lahan penghidupan antara polisi dan pecalang.

Hal inilah yang mengkhawatirkan Wayan P. Windia, seorang ahli hukum adat di Bali. Bagi Windia belum adanya aturan yang memberikan kejelasan sejauh mana fungsi dan wewenang pecalang menyebabkan yang berlangsung hari ini adalah masing-masing desa memberdayakan satuan pengamanannya dalam kerangka aturan yang mengikat masing-masing desa (*awig-awig* desa pekraman). Itulah mengapa bagi Windia, mutlak dibutuhkan peraturan yang mengatur sepak terjang pecalang. Lebih lanjut, hal tersebut dapat diinisiasi dengan mengembangkan organisasi pecalang sedesa pekraman di Bali, sehingga seluruh pecalang di Bali dapat diatur guna meningkatkan koordinasi dan menghindari carut marut dalam pelaksanaan tugasnya. Windia menjelaskan semua langkah-langkah ini perlu diambil guna mencegah pecalang yang tunduk kepada pemodal, dimana pecalang dapat dipergunakan demi kepentingan sang pemilik modal. Indikasi ini ia temukan, misalnya, dalam melihat sepak terjang pecalang yang menjaga keamanan artis yang datang ke Bali. Lebih jauh, ia menyatakan terdapat kasus dimana dalam satu desa, ada warga yang dikucilkan dan ditindak oleh desa pekramannya, melalui pecalang, karena disinyalir tidak memilih calon pasangan tertentu dalam Pemilukada. Terulangnya kejadian ironis inilah yang ingin dihindarkan dalam melihat posisi pecalang kedepannya.

Padahal di dalam wacana tentang pecalang, tersembunyi wacana kekerasan yang jauh dari imajinasi publik tentang Bali. Sejarah kekerasan Bali tersimpan rapi di balik selubung wacana pariwisata yang selama ini menjadi sumber ekonomi dominan Bali. Dalam Pecalang termanifestasikan wacana kekerasan yang selama ini ada di masyarakat. Dalam beberapa kasus kriminal misalnya, kehadiran pecalang memungkinkan masyarakat mengambil tindakan anarkis tanpa campur tangan negara.⁴ Pengeroyokan, perkelahian antar desa, atau tindakan-tindakan kriminal lainnya tidak akan dapat ditangani oleh negara dengan menyatakannya sebagai kasus adat. Adat pula yang menjadi tameng dalam mengidentifikasi kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Dengan *image* sebagai pulau seribu pura, dan dengan pertarungan *image* pariwisata internasional, maka tepat disinilah pecalang yang melekat dengan adat menjadi wilayah kontestasi pemaknaan.

Tugas Pecalang sebagai penjaga rasa aman masyarakat Bali untuk melakukan ritual, memberikan kesan bahwa pecalang adalah yang unik dan tradisional. Ini karena adat dan sejarahnya pecalang memang telah ada dari dulu, atau memang diada-adakan untuk menguatkan latar sejarah kemunculan pecalang. Seperti yang ditegaskan Santikarma (2003) untuk memberikan gambaran awal tentang pecalang:

⁴ Bandingkan dengan James T. Siegel (2000), dimana Siegel mencatat kriminalitas merupakan efek operasi kuasa Orde Baru yang menyingkirkan rakyat dalam diskursus Negara.

“Lepas dari ketiadaan konsensus mengenai sejarah pecalang, semua orang yang saya ajak bicara sepakat dengan gagasan yang sering muncul di media massa atau keluar dari mulut pejabat bahwa pecalang adalah sesuatu yang tradisional. Walaupun mereka sadar bahwa tidak pernah ada yang disebut pecalang di desa mereka sebelumnya, mereka mampu meyakinkan seolah-olah pecalang bagian dari warisan kuno yang baru saja digali. Dengan memakai wacana tradisional Bali, pecalang mampu menghapuskan dengan sukses ke-modern-an mereka. Dengan memakai predikat penjaga tradisi, sekaligus mereka menjadi penjaga tradisional.”

(Santikarma, 2003)

Sosok pecalang ini menjadi baru sekaligus klasik. Dengan mendasarkan dirinya pada akar tradisi masyarakat Bali, pecalang hadir sejalan dengan usaha membangkitkan kembalinya pariwisata di Bali. Satgas Pecalang muncul dimana-mana, lebih-lebih setelah diatur dalam peraturan daerah yang memberikan dasar hukum bagi pembentukannya. Secara perlahan, tapi pasti, pecalang mulai ambil bagian dalam kehidupan di Bali.

Pecalang: Penanda Kosong?⁵

Sampai di sini, dalam Pecalang melekat fungsi kekuasaan dengan adat sebagai simbol yang memberikan legitimasi atas tindak koersif (memaksa) yang selama ini hanya dimonopoli negara. Memeriksa, menjaga ketertiban, dan memberikan sanksi tidak lagi semata-mata milik negara. Dalam ruang-ruang sosial, pecalang hadir menandai hadir kembalinya desa adat yang selama ini nyaris tenggelam oleh kebijakan pembangunan Orde Baru. Pecalang adalah jawaban masyarakat dalam arena pertarungan kekuasaan yang dilakukan masyarakat untuk merebut sumber-sumber dari negara, akibat dari wacana pembangunan yang dulunya meminggirkan mereka, dimana pembangunan hanya berdampak signifikan bagi sekelompok kecil elit dan tidak merengkuh bagian besar masyarakat.

Pengamanan objek-objek kunjungan wisata, tempat hiburan, maupun industri pariwisata mulai diserahkan pengelolaannya kepada pecalang, disamping polisi sebagai pihak keamanan. Peran pecalang tidak lagi terbatas dalam wilayah adat dan tradisi, tapi memasuki ranah-ranah sosial, wilayah yang dulunya dimonopoli oleh negara. Dengan perannya yang begitu strategis, dan kemampuannya memobilisasi anggota-anggotanya, menjadikan pecalang tidak lagi dapat dipandang sebelah mata. Pecalang menjadi tanda hadirnya suatu masyarakat adat, masyarakat Bali yang dikenal luas tradisi Hindunya. Disinilah kehadiran pecalang dapat dimaknai sebagai produk dari perebutan ruang politik di masyarakat. Kekuasaan negara mendapatkan tantangannya, apabila kekuasaan pecalang dapat dilihat sebagai manifestasi dari kekuasaan adat dalam ruang-ruang sosial politik.

⁵ Konsepsi ruang kosong ini meminjam dari Ernesto Laclau. Mengambil inspirasinya dari kajian-kajian filsafat poststrukturalis, Laclau bersama Chantal Mouffe mengkaji sejarah pemikiran kiri dengan logika kontingensi yang selama ini menggerakkan perdebatan pemikiran kiri hingga ini. Gagasan tentang diskursus menghantarkannya pada pemahaman tentang temporalitas dari logika pemaknaan. Lihat Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy: Toward A Radical Democratic Politic*, London: Verso, 2001, edisi kedua, naskah asli terbit 1985. Lebih jauh, lihat Ernesto Laclau, *New Reflection on The Revolution of Our Time*, London: Verso, 1990.

Interaksi langsung penulis dengan pecalang di desa penulis sendiri, penulis alami ketika seorang laki-laki tegap datang mengetuk pintu rumah penulis. Status keluarga penulis yang baru pindah saat itu menjadikan penulis sebagai warga pendatang, karenanya wajib membayar iuran sebesar Rp. 30.000,- setiap bulannya. Dengan iuran ini, kata laki-laki tersebut, penulis bisa langsung mengurus surat pindah, mengurus kepindahan kartu keluarga, dan mengurus kartu identitas dengan alamat baru. Keluarga penulis diterima menjadi klian banjar dan warga desa setempat, selain dengan kewajiban yang mengikat sebagai warga banjar dan desa, ditambah kewajiban membayar iuran.

Dalam kesehariannya, praktik pecalang dapat mengambil beragam bentuk. Semisal sebagai penjaga lalu lintas saat upacara adat, memastikan bahwa wisatawan yang sembarangan—berpakaian atau berperilaku buruk—tidak diperbolehkan untuk memasuki pura-pura, dan menjaga sabung ayam yang diselenggarakan sebagai bagian dari upacara. Mereka juga bertindak sebagai penjaga pada hari raya Nyepi. Mereka berpatroli di jalan untuk memastikan bahwa setiap orang, Hindu atau tidak, terus mematikan lampu dan tidak keluar ke jalan-jalan.

Dalam perbincangan ringan penulis dengan seorang teman penulis, ia berkata bahwa saat itu ia baru pulang dari melakukan razia kartu identitas, dengan menggerebek rumah-rumah atau kost-kostan yang dihuni oleh kaum pendatang, meminta penduduk untuk menunjukkan kartu identitas, atau kartu identitas penduduk musiman (KIPEM). Apabila tidak dapat menunjukkan salah satu identitas diri, maka yang bersangkutan akan digelandang ke bale banjar, untuk dicatat dan kemudian diberi sangsi. Sangsi yang diberikan bermacam-macam, mulai dari denda sejumlah uang, hingga membersihkan areal bale banjar. Dalam wilayah lain seperti Sanur, ada indikasi banyak anggota pecalang bertindak sebagai penjaga untuk tempat pelacuran yang dapat ditemukan di daerah Semawang.

Sementara kehadiran pecalang di Bali bisa diambil sebagai paralel dengan munculnya banyak kelompok-kelompok milisi di daerah-daerah lain di Indonesia, kasus Bali menyajikan beberapa perbedaan penting. Bukannya menuai *image* buruk dalam pers nasional dan internasional, seperti kelompok 'keamanan' militan lainnya (terutama mereka yang mempergunakan agama untuk melegitimasi diri mereka sendiri), pecalang justru menuai pujian. Pecalang seringkali mendapat kepercayaan untuk terlibat dalam konferensi Internasional yang diselenggarakan di Bali.

Paling akhir pada November 2011, Bali menjadi tuan rumah dari KTT ASEAN dan *East Asian Summit* yang dihadiri sejumlah kepala negara dari perwakilan negara anggota ASEAN dan East Asian Summit, termasuk diantaranya Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden China Hu Jintao, Presiden Rusia Dmitry Medvedev, Perdana Menteri Australia Julia Gilard, Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra, dan Presiden Philipina Benigno Aquino. Secara signifikan momen ini sekali lagi menandai kebangkitan citra Bali sebagai wilayah yang sempat menjadi target sasaran serangan bom pada tahun 2002 dan 2005 silam dengan pecalang turut serta didalamnya. Tanpa mengesampingkan peran serta seluruh elemen yang terlibat di dalam penyelenggaraan even internasional ini, kali ini kehadiran masyarakat desa adat dapat dipastikan melalui manifestasinya dalam pecalang.

Daftar Pustaka

- Geertz, Clifford. 2000. *Negara Teater: Kerajaan-kerajaan di Bali Abad Kesembilan belas*, Yogyakarta: Bentang.
- Laclau, Ernesto & Chantal Mouffe. 2001 [1985]. *Hegemony and Socialist Strategy: Toward A Radical Democratic Politic*. London: Verso, 2001.
- Laclau, Ernesto. 1990. *New Reflection on The Revolution of Our Time*. London: Verso.
- Nordholt, Henk Schulte. 2005. "Bali: Sebuah Benteng Terbuka", pengantar dalam I Ngurah Suryawan, *Bali, Narasi dalam Kekuasaan: Politik dan Kekerasan di Bali*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Nordholt, Henk Schulte. 2009. *The Spell Of Power: Sejarah Politik Bali 1650-1940*. Bali: Pustaka Larasan & KITLV.
- Robinson, Geoffrey. 2006. *Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik*. Yogyakarta: LKiS.
- Siegel, James T.. 2000. *Penjahat Gaya (Orde) Baru, Eksplorasi Politik dan Kriminalitas*, Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Suryawan, I Ngurah. 2005. *Bali, Narasi dalam Kekuasaan: Politik dan Kekerasan di Bali*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Santikarma, Degung. 2003. "The Model Milita: A New Security Force In Bali Is Cloaked In Tradition," dalam *Inside Indonesia*, edisi 73 (Januari-Maret).
- Purbathin Hadi, Agus. t.t. *Eksistensi Desa Adat dan Kelembagaan Lokal: Kasus Bali*. URL: <http://suniscome.50webs.com/data/download/35%20DESA%20ADAT%20BALI.pdf>, diakses: 11 Januari 2011.